

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Adjie, Habib, 2011, *Majelis Pengawas Notaris sebagai Pejabat Tata Usaha Negara*, Refika Aditama Bandung.
- Anshori, Abdul Ghofur, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika*, UIIPress, Yogyakarta.
- Arikanto, Suhartini, 2006, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Ash-shofa, Burhan, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Keempat, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Fuady, Munir, 2002, *Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer)*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Handyaningrat, Soewarno, 1997, *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*, Gunung Agung, Jakarta.
- Irawan, Prasetya, 1997, *Managemen Sumber Daya Manusia*, STIA-LAN, Jakarta.
- Koentjoro, Diana Hakim, 2004, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta.
- Nasution, S, 2006, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, Cetakan Ke-8, Bumi Aksara, Jakarta.
- Rifani Nisya, dan Hartanti Sulihandari, 2013, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris*. Dunia Cerdas, Jakarta.
- Setiawan, dan Mulyadi, 1999, *Hukum Administrasi Nrgara, Lembaga Administrasi*, Jakarta.
- Setyosari, Punaji, 2010, *Metode Penelitian Pendidikan dan Pengembangan*, Kencana, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2002, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Sudarsono, 1999, *Kamus Hukum Cetakan Kedua*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.

Sumarjono, Maria SW, 2014, *Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Tobing, G.H.S. Lumban, 1999, *Peraturan Jabatan Notaris (Notaris Reglement)*, Penerbit Erlangga, Jakarta.

B. Jurnal/ Tesis

Sari, Dianika Lusya, “Peranan Majelis Pengawas Dalam Penegakkan Hukum Di Daerah Istimewa Yogyakarta” , *Tesis*, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2013.

Sari, Kartika, “Peran Majelis Pengawas Daerah Notaris Terhadap Pelanggaran Kode Etik Notaris di Kota Padang”, *Skripsi*, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Andalas, Padang, 2010.

Nashara tasya, Ghessa, “Peran Majelis Pengawas Daerah Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Yang Menghadapi Masalah Hukum DI Jakarta Timur”, *Tesis*, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2013.

C. Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432).

Undang-Undang Jabatan Notaris No. 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor Tiga Dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491).

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Butgelijk Wetboek Voor Indonesia*).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Wetboek Van Strafrecht*).

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 Tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi , Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris;

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia M.01-HT.03.01 Tahun 2006 Tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, perpindahan, dan Pemberhentian Notaris;

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.Hh-06.Ah.02.10 Tahun 2009 Tentang Sekretariat Majelis Pengawas Notaris;

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 25 Tahun 2014 tentang tata cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris;

Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I) ditetapkan di Bandung pada tanggal 28 Januari 2005.

D. Internet

Kementerian Hukum Dan HAM Kantor Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, “Daftar Nama Notaris Kabupaten Sleman”, <Http://Jogja.Kemenkumham.Go.id/Layanan-Publik/Pelayanan-Hukum-Dan-Ham/Kenotariatan/2016/Kota-Yogyakarta>, Diakses Tanggal 28 Desember 2016.